

PENGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI MEKANISME PENDISCIPLINAN DI SMAN 2 KARANGAYAR

Dhea Aulianida, Siany Indria Liestyasari dan Siti Rochani Ch

Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Sebelas Maret Surakarta

aulianidhea@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine (1) the forms of violation of school rules are carried out on students at SMAN 2 Karanganyar, which is already recorded CCTV; (2) to know what is being done by schools in using CCTV as a disciplinary mechanism student at SMAN 2 Karanganyar

This research used descriptive qualitative method to produce and process the research data descriptive nature, such as transcripts of interviews and observations. The population in this study are all the academic community SMAN 2 Karanganyar. Informant chosen are some of the teachers, staff and students. The technique of taking informants using purposive sampling based on certain criteria, (1) the informant was a school principal, teachers, Counseling of STP2K officers, employees and students; (2) have the authority or experience of the individual against the use of CCTV in SMAN 2 Karanganyar. Data collection technique is conducted by interview and observation about the use of CCTV as a disciplinary mechanism. Data analysis technique is done by means of data collection, data reduction, data display and drawing conclusions or data verification.

The results of this study are as follows. First, a violation of the order of students who do students at SMAN 2 Karanganyar The recorded CCTV categorized into three types of violations of discipline. (1) forms of discipline violations relationship that is theft by students with a load point 50; (2) forms of discipline violations environment, namely rowdy in class, destroying furniture, jumped the fence, and brought HP to school with a load of 10-20 points; and (3) disorderly pray that is a form of discipline violations worship with a load of 10-25 points. Secondly, the efforts made SMAN 2 Karanganyar in using CCTV as a disciplinary mechanism 22 students with the use of CCTV in classrooms and 9 CCTV in public spaces within the school environment. In addition, the hierarchy of school supervision performed by placing the CCTV security monitor in the principal's office and space guidance and counseling. The use of CCTV as a disciplinary mechanism in SMAN 2 Karanganyar ineffective because one of the requirements of discipline that the examination system does not take place and it is generally known by the students. Panopticon causing effects which should lead to awareness and visibility that makes people feel as though automatically monitored and permanently does not happen.

Keywords : CCTV, disciplinary, school

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa di SMAN 2 Karanganyar yang selama ini sudah terekam CCTV; (2) upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam menggunakan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan siswa di SMAN 2 Karanganyar

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menghasilkan dan mengolah data penelitian yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademik SMAN 2 Karanganyar.. Informan yang terpilih adalah kepala sekolah, beberapa guru, karyawan, dan siswa. Teknik pengambilan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu (1) informan adalah seorang kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, petugas STP2K, karyawan dan siswa; (2) mempunyai wewenang atau pengalaman individu terhadap penggunaan CCTV di SMAN 2 Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik wawancara dan observasi tentang penggunaan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. *Pertama*, bentuk pelanggaran tata tertib siswa yang dilakukan siswa di SMAN 2 Karanganyar yang sudah terekam CCTV di kategorikan ke dalam tiga jenis pelanggaran tata tertib. (1) bentuk tindakan pelanggaran tata tertib hubungan yaitu tindak pencurian oleh siswa dengan beban poin 50; (2) bentuk tindakan pelanggaran tata tertib lingkungan, yaitu gaduh di kelas, merusak mebel, melompat pagar, dan membawa HP ke sekolah dengan beban poin 10-20; dan (3) tidak tertib sholat berjamaah yang merupakan bentuk tindakan pelanggaran tata tertib ibadah dengan beban poin 10-25. *Kedua*, upaya yang dilakukan SMAN 2 Karanganyar dalam menggunakan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan siswa dengan penggunaan 22 CCTV di ruang kelas dan 9 CCTV di ruang publik dalam lingkungan sekolah. Selain itu juga adanya hierarki pengawasan yang dilakukan sekolah dengan menempatkan monitor pengawas CCTV di ruang kepala sekolah dan ruang Bimbingan dan Konseling. Penggunaan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan di SMAN 2 Karanganyar tidak efektif karena salah satu syarat pendisiplinan yaitu sistem ujian tidak berlangsung dan hal ini diketahui secara umum oleh siswa. Sehingga menyebabkan efek panopticon yang seharusnya menimbulkan kesadaran dan visibilitas yang membuat individu merasa otomatis diawasi dan seolah olah permanen tidak terjadi.

Kata Kunci : CCTV, pendisiplinan, sekolah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki penduduk sebesar lebih kurang 252,20 juta jiwa menurut Perkiraan Penduduk Beberapa Negara 2000-2014 yang dilakukan BPS. Dari jumlah tersebut kurang lebih 66% penduduk ada pada rentang umur 15-64 tahun, sedangkan 27% pada rentang umur 0-4 tahun dan 6% pada rentang umur 65 tahun ke atas. Dilihat dari data tersebut maka mayoritas penduduk Indonesia adalah usia produktif yang membutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan individunya.

Pendidikan merupakan proses mengembangkan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang kompeten suatu Negara mampu mengolah sumber daya alamnya sehingga memiliki manfaat demi mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh warga negaranya. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang memfasilitasi terjadinya proses mendidik sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Dalam prosesnya sekolah menerapkan suatu sistem yang memiliki aturan mengikat untuk setiap orang yang berada di dalamnya. Aturan tersebut dinamakan dengan tata tertib sekolah (Indrakusuma, 1973: 140). Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar apabila tata tertib yang telah ditetapkan dijalankan dengan penuh tanggungjawab. Namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak selalu berjalan sempurna.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama Oktober-Desember 2015 di SMAN 2 Karanganyar, peneliti menemukan tindakan pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan siswa. Seperti misalnya berada di kantin saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung, tetap berada di kelas atau pergi ke kantin saat ibadah Dhuhur (wajib di sekolah tersebut), mencontek saat ujian berlangsung atau gaduh di kelas. Hal tersebut tentu melanggar tata tertib

sekolah yang berlaku. Padahal pelaksanaan tata tertib sekolah yang tidak sempurna dapat mengganggu kelancaran proses pendidikan. Oleh karenanya sekolah menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar tata tertib sekolah. Sedangkan untuk tindakan preventifnya SMAN 2 Karangayar juga mengadopsi teknologi kamera pengawas dengan memasang *closed circuit television* (CCTV) di setiap kelas dan ruang publik di lingkungan sekolah sebagai alat bantu pengawasan, namun tetap saja di temukan tindakan undisiplin.

Melihat fakta bahwa masih terjadi pelanggaran tata tertib meskipun sekolah telah menggunakan CCTV sebagai alat bantu pengawasan maka timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya penggunaan CCTV di SMAN 2 Karangayar. Tentu pada masing-masing sekolah memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri mengapa memutuskan mengadopsi teknologi kamera pengawas sebagai alat bantu kegiatan pengawasan. Dari hasil pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penggunaan Closed Circuit Television Sebagai Mekanisme**

Pendisiplinan Di SMA Negeri 2 Karangayar.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan pada siswa di SMAN 2 Karangayar yang selama ini sudah terekam CCTV.
2. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh sekolah dalam menggunakan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan siswa di SMAN 2 Karangayar.

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan dan Pendisiplinan di Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tertentu yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Bentuk peraturan sekolah itu disebut dengan tata tertib sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudrajat (2008: 24) “setiap siswa dituntut dan diharapkan untuk berperilaku setuju dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya”. Pentingnya peraturan sekolah tersebut dibuat dalam mendidik rasa disiplin yang berperan

mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Perkins (Unaradjan, 2003: 4) menyatakan, disiplin diri adalah upaya sadar dan bertanggungjawab dari seseorang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengontrol tingkah laku dan sikap hidupnya agar seluruh keberadaannya tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan untuk memberikan pelatihan untuk mendisiplinkan anak, empat unsur pokok disiplin yaitu peraturan, hukuman, penghargaan dan konsistensi Hurlock (2011: 85-94):

- a. Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk berbuat atau bertingkah laku, tujuannya adalah membekali siswa dengan pedoman perilakuyang disetujui dalam situasi dan kelompok tertentu;
- b. hukuman diperlukan juga untuk mengendalikan perilaku disiplin, tetapi hukuman bukan satu-satunya cara untuk mendisiplinkan anak atau siswa;
- c. penghargaan tidak hanya berbentuk materi tetapi juga berbentuk pujian,

kata-kata, senyuman atau tepukan di punggung; dan

- d. konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Keempat unsur tersebut haruslah ada agar sikap disiplin yang diharapkan sekolah pada siswa dapat terwujud.

Mekanisme Penegakan Disiplin

Berikut adalah mekanisme pendisiplinan yang biasanya di jalankan di sekolah agar tercipta suatu keteraturan sebelum teknologi kamera pengawas diyakini lebih efisien dalam membantu kegiatan pengawasan di sekolah-sekolah:

1. Hukuman

Hukuman menurut Hurlock (2011: 86) berarti “menjatuhkan sanksi pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan” . Dapat dikatakan bahwa sanksi yang diberikan bagi si pelanggar merupakan bagian dari hukuman agar si pelanggar jera dan kembali taat pada aturan. Hal tersebut serupa dengan pendapat Utami Munandar (2002: 103) bahwa:

“...pemberian hukuman akan memberikan dampak pada pelaku untuk membentuk manusia yang taat dan patuh, selain itu dengan adanya penghukuman maka akan dapat segera menghentikan perilaku menyimpang, memberi petunjuk bagi pelanggar mengenai tingkah laku yang dapat diterima serta hukuman itu mampu mengurangi seseorang meniru tingkah laku orang lain yang melanggar aturan”.

Penghukuman tersebut bertujuan agar individu taat dan patuh. Dengan individu taat dan patuh berarti menunjukkan suatu kedisiplinan.

2. Sistem Poin

Aktifitas penegakan tata tertib siswa berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut 1) penyusunan tata tertib; 2) sosialisasi pada semua warga sekolah; 3) pembentuk tim yang bertugas memantau dan menilai sikap, ucapan dan tindakan siswa di sekolah serta memberi poin; 4) mencatat hasil pemantauan/ poin siswa dan mengkomunikasikannya; 5) guru, wali kelas, guru BK mencermati, mengawasi siswa yang bermasalah dan membantunya untuk

memecahkan masalah yang dihadapi; dan 6) hasil pemantauan dan penilaian yang terdapat dalam portofolio merupakan bahan penilaian untuk setiap akhir semester (Ashari, 2013: 8-9).

3. CCTV

Dari contoh mekanisme penegakan disiplin yang bisa digunakan di sekolah diatas ditemukanlah suatu persamaan. Diantaranya yaitu pada masing-masing mekanisme pendisiplinan selalu saja dibutuhkan suatu proses “pengawasan” atau “monitoring”.

Menurut Khotib, “CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu” (2012: 46). Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel,

bandara, gudang militer, pabrik maupun pergudangan.

Selain untuk kepentingan keamanan CCTV juga digunakan dalam dunia pendidikan. Fungsinya dimanfaatkan sebagai pendukung fungsi pengawasan di sekolah. Yang paling terlihat manfaatnya, adalah membantu memastikan pelayanan KBM di kelas. Meski tanpa rekaman suara, dari kamera pengintai ini setidaknya bisa dilihat seperti apa kondisi dan pengelolaan kelas dan layanan individual guru.

Mekanisme Pendisiplinan Foucault

Pendisiplinan adalah sebuah mekanisme pembentukan perilaku individu yang taat dan patuh pada serangkaian norma melalui sistem kontrol atau pengawasan terhadap individu. Tubuh individu mampu menafsirkan setiap perintah. Ia bukan saja menjadi objek reaktor (hanya bereaksi terhadap perintah), melainkan ia juga menjadi objek interpretator (mampu menginterpretasikan perintah) (Martono, 2014: 86-87). Upaya membentuk perilaku tubuh yang

taat dan dapat dikendalikan (Foucault menyebutnya dengan *mekanisme pendisiplinan*) dapat dilakukan dengan tiga cara (Sheridan, 1997: 170-183):

Pertama, upaya membentuk perilaku tubuh yang taat dan dapat dikendalikan dengan mekanisme pendisiplinan dilakukan melalui pengamatan (pengawasan) bertingkat biasanya disebut dengan panopticon. Panopticon merupakan sebuah bentuk sistem pengawasan melalui pengamatan, pengumpulan dan informasi dan pemantauan setiap orang oleh atasan atau orang yang berkuasa diatas mereka dan melindungi komunikasi dan informasi penting. Mekanisme panopticon melahirkan subjek yang sebenarnya, dan menginternalisasikan kuasa penaklukan ke dalam dirinya sendiri, yang menjadi subjek penaklukan dirinya sendiri.

Kedua, setelah dilakukan pengawasan bertingkat selanjutnya dilakukan normalisasi. Normalisasi merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan masyarakat tradisional namun mekanismenya ini

masih digunakan pada masa modern sekarang. Melalui instrumen normalisasi seorang individu tidak hanya dinilai hanya dari kebaikan dan kesalahannya yang dilakukannya namun ia dinilai dengan membandingkannya dengan individu lain menggunakan standar tertentu. Biasanya standar yang digunakan menggolongkan perilaku normal dan tidak normal. Keberadaan normalisasi ini akan membentuk kedisiplinan dalam diri individu karena mereka akan berusaha bertindak memenuhi standar tersebut

Ketiga, ujian. Ujian merupakan lokus utama kekuasaan atau pengetahuan modern karena menggabungkan kekuatan (kemampuan, kecerdasan) dan kebenaran dalam satu kesatuan yang utuh (Gunting, 2005b: Jardine, 2005). Ujian juga mencerminkan cara kerja sistem pengawasan yang ketat ketika gerak-gerik individu senantiasa diawasi seseorang. Ini menggabungkan unsur kekuasaan dan pengawasan.

Ketiga cara mekanisme pendisiplinan tersebut ia temukan dalam mekanisme pendisiplinan pada sistem penjara kuno. Namun setelah diamati, mekanisme pendisiplinan yang diterapkan pada sistem penjara juga dijumpai pada mekanisme pendisiplinan pada sistem sekolah. Sistem panopticon di lingkungan sekolah juga menjadi salah satu fokus pemikiran Foucault. Menurut Foucault (1975), mekanisme pendisiplinan di sekolah juga dapat menerapkan sistem panopticon. Sistem tata bangunan di banyak sekolah di bentuk mirip bentuk penjara panopticon. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan guru mengawasi aktifitas muridnya. “Sekolah adalah karantina, selama di sekolah murid “dipenjara” selama beberapa saat setiap hari” (Martono, 2014: 113). Mereka berada di sebuah tempat penuh pengawasan setiap saat. Siswa yang datang terlambat, atau siswa yang membolos, akan terdeteksi melalui sistem absen. Apalagi, di era modern ini sistem pengawasan juga telah berkembang sedemikian

canggihnya dengan pemanfaatan kamera pengawas atau lebih dikenal dengan CCTV. Hope (2013) menyimpulkan dalam Nanang Martono (2014: 93) bahwa “CCTV adalah sistem pengawasan panopticon dalam masyarakat modern”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menghasilkan dan mengolah data penelitian yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah civitas akademik SMAN 2 Karangayar.. Informan yang terpilih adalah kepala sekolah, beberapa guru, karyawan, dan siswa. Teknik pengambilan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu (1) informan adalah seorang kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling, petugas STP2K, karyawan dan siswa; (2) mempunyai wewenang atau pengalaman individu terhadap penggunaan CCTV di SMAN 2 Karangayar. Teknik pengumpulan

data dilaksanakan dengan teknik wawancara dan observasi tentang penggunaan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (conclusion drawing).

HASIL PENELITIAN

1. Pelanggaran yang Selama Ini Sudah Terekam CCTV

a) Pelanggaran Tata Tertib Kehadiran

Bentuk tindakan pelanggaran tata tertib kehadiran yang paling sering dilakukan siswa SMAN 2 Karangayar adalah datang terlambat ke sekolah. Keterlambatan yang dialami siswa rata-rata disebabkan karena jarak rumah siswa dengan sekolah yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu tempuh yang tidak sebentar. Selain itu beberapa siswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi harus menumpang kendaraan umum yang armadanya masih terbatas dan memiliki waktu tiba yang kurang pasti.

Meskipun terlambat masuk sekolah adalah bentuk pelanggaran tata tertib sekolah yang paling sering dilakukan siswa namun hal ini bukanlah pelanggaran yang sudah terekam CCTV. Sebab SMAN 2 Karangayar memiliki tim tersendiri dalam menangani bentuk tindakan pelanggaran yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran tata tertib kehadiran di sekolah, pihak yang bertanggung jawab tersebut adalah petugas STP2K dan piket KBM setiap harinya.

b) Pelanggaran Tata Tertib Upacara dan Berbusana

Bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan siswa dalam kategori ini biasanya berhubungan dengan kelengkapan atribut sekolah atau ketertiban seragam saat mengikuti upacara maupun seragam sekolah yang dipakai sehari-harinya.

c) Pelanggaran Tata Tertib Hubungan

Bentuk pelanggaran yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran tata tertib hubungan yang telah terekam oleh CCTV di

SMA 2 Karangayar adalah tindakan mencuri yang diawali dari laporan kehilangan oleh pihak yang bersangkutan.

Namun dalam kasus yang berbeda adanya CCTV justru dapat membuktikan bahwa tidak terjadi pencurian, bahwa setiap laporan kehilangan yang dilaporkan pada sekolah tidak selalu berujung pada pencurian yang dilakukan siswa terhadap temannya. Sebab CCTV juga berfungsi sebagai alat bukti apakah peristiwa kehilangan tersebut merupakan peristiwa pencurian atau bukan. Dalam hal ini sekolah berkewajiban memastikan dengan cara membuka rekaman CCTV.

d) Pelanggaran Tata Tertib Lingkungan

Bentuk pelanggaran yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran tata tertib lingkungan yang telah terekam oleh CCTV di SMA 2 Karangayar yang pertama adalah tindakan merusak sarana prasara sekolah, seperti merusak mebeler atau sarana prasarana sekolah. Selain itu siswa juga pernah tertangkap kamera sedang

melompat pagar atau jendela sekolah, membuat gaduh kelas dan siswa kedapatan membawa HP ke sekolah.

e) Pelanggaran Tata Tertib Ibadah

Bentuk pelanggaran yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran tata tertib ibadah yang telah terekam oleh CCTV di SMA 2 Karangayar adalah tindakan tidak mengikuti sholat berjamaah yang diselenggarakan oleh sekolah setiap harinya. Baik itu sholat Dhuhur berjamaah maupun sholat Jum'at berjamaah. Sebab pelaksanaan ibadah sholat berjamaah sangat dianjurkan di SMAN 2 Karanganyar, sehingga jika siswa kedapatan tidak melaksanakannya akan dikenai sanksi berupa poin melanggar tata tertib ibadah.

2. Upaya Sekolah menggunakan CCTV sebagai Mekanisme Pendisiplinan Siswa

a) Penggunaan CCTV di Setiap Ruang Kelas dan Ruang Publik di Lingkungan Sekolah

CCTV di SMAN 2 Karangayar tersebar di 32 titik di seluruh lingkungan sekolah, 22 diantaranya berada di ruang kelas. Hal tersebut

dapat dilihat dari tampilan layar monitor pengawas CCTV yang menampilkan 16 tampilan yang berbeda dalam satu kali tampilan dan berganti setiap 10 detiknya menuju 16 tampilan selanjutnya. Keadaan dan suasana yang ditampilkan monitor pengawas CCTV merupakan gambar berwarna namun tidak memiliki suara.

b) Penggunaan Monitor Pengawas CCTV di Dua Tempat

Monitor pengawas CCTV diletakkan di dua tempat berbeda. Yang pertama ada di ruang Kepala Sekolah dan yang kedua ada di ruang Bimbingan dan Konseling. Mengenai alasan mengapa peletakkan monitor pengawas CCTV ada di dua tempat berbeda di sekolah, dikarenakan kedua pihak memiliki peran yang penting dan berbeda dalam hal pengawasan di sekolah. Monitor pengawas CCTV yang diletakan di ruang BK difungsikan untuk pengawasan oleh BK terhadap siswa. Sedangkan monitor pengawas CCTV yang diletakan di ruang kepala sekolah difungsikan untuk membantu

kepala sekolah dalam tugasnya mengawasi seluruh sekolah terkait kebijakan yang mungkin akan dibuat untuk memastikan ketertiban di sekolah tetap terjaga. Namun CCTV di SMAN 2 Karangayar tidak memiliki staf khusus yang mengawasi tampilan monitor pengawas CCTV. Pemanfaatannya hanya ketika ada pelaporan kehilangan dari siswa pada pihak sekolah, sehingga nantinya pihak sekolah baru menugaskan salah satu staf sekolah yang bertanggung jawab untuk membuka rekaman CCTV untuk menindaklanjuti pelaporan kehilangan siswa.

Pembahasan

Penggunaan CCTV oleh masyarakat modern sebagai alat bantu pengawasan sudah merupakan hal yang umum ditemui, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Hope (2013) dalam Nanang Martono (2014: 93) juga mengungkapkan bahwa “CCTV adalah sistem pengawasan panopticon dalam masyarakat modern”..

SMAN 2 Karangayar menyadari kebenaran hal tersebut dan memutuskan menggunakan CCTV sebagai sistem pengawasan beberapa fasilitas penting di lingkungan sekolah sejak tahun 1998. Penggunaan CCTV di sekolah diharapkan mampu menanamkan suatu kesadaran dan visibilitas bahwa ada sosok penguasa yang sedang mengawasi setiap kegiatan di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa SMAN 2 Karangayar telah menerapkan panopticism dalam sistem pengawasannya. Namun karena tidak semua sisi di lingkungan sekolah dapat terpantau CCTV dan tidak setiap pelanggaran tata terib siswa bisa teridentifikasi melalui CCTV maka ada beberapa hal yang sebenarnya merupakan pelanggaran tata tertib sekolah namun tidak terekam oleh CCTV.

Sementara ini ada tiga jenis pelanggaran yang dapat terekam dan diidentifikasi oleh CCTV sebagai bentuk tindakan pelanggaran tata tertib siswa. (1) bentuk tindakan pelanggaran tata tertib hubungan yaitu tindak

pencurian oleh siswa dengan beban poin 50; (2) bentuk tindakan pelanggaran tata tertib lingkungan, yaitu gaduh di kelas, merusak mebel, melompat pagar, dan membawa HP ke sekolah dengan beban poin 10-20; dan (3) tidak tertib sholat berjamaah yang merupakan bentuk tindakan pelanggaran tata tertib ibadah dengan beban poin 10-25. Pelanggaran tata tertib siswa tetap terjadi meskipun sudah ada CCTV di ruang kelas. Lalu apa yang melatarbelakangi tetap terjadinya tindakan pelanggaran tata tertib di ruang kelas ber-CCTV oleh siswa. Hal ini bisa ditelusuri melalui evaluasi kembali apakah tiga cara mekanisme pendisiplinan berjalan dengan benar.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pendisiplinan adalah suatu mekanisme untuk membuat individu taat dan patuh pada suatu aturan yang telah ditentukan oleh penguasa. Menurut Foucault (1975) dalam Nanang Martono (2014: 87-92) ada tiga cara bagaimana suatu mekanisme pendisiplinan dapat berjalan secara

maksimal, diantaranya ada: a) pengawasan (pengamatan) bertingkat; b) normalisasi; dan c) sistem ujian.

Pertama, pengawasan (pengamatan) bertingkat yang didasarkan sebuah fakta bahwa kita dapat mengontrol apa yang dilakukan orang lain hanya dengan mengamati aktifitas mereka (Foucault, 1975 dalam Nanang Martono, 2014:87-88). Hal ini bisa dilakukan dengan mekanisme panopticon. Seperti yang diketahui baik penjara ataupun sekolah keduanya memiliki keidentikan bagaimana menerapkan mekanisme pendisiplinan.

SMAN 2 Karangayar telah menggunakan sistem pengawasan panopticon yang lebih modern setelah menggunakan 22 CCTV di ruang kelas dan 9 CCTV di beberapa ruang publik sekolah yang dapat dipantau melalui monitor pengawas CCTV. SMAN 2 Karangayar-pun tidak hanya menggunakan satu monitor pengawas CCTV saja melainkan dua monitor pengawas CCTV sekaligus yang diletakkan di dua

tempat berbeda. Monitor Pengawas CCTV di SMAN 2 Karangayar terletak di ruang BK dan ruang kepala sekolah. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pengawasan bertingkat di SMAN 2 Karangayar. Siswa merasa diawasi oleh guru, sedangkan guru merasa diawasi oleh kepala sekolah. Berdasarkan fakta lapangan di SMAN 2 Karangayar yang telah di paparkan menunjukkan bahwa SMAN 2 Karangayar sudah menerapkan pengawasan (pengamatan) bertingkat dalam mekanisme pendisiplinan di sekolah.

Selanjutnya syarat *kedua* bagaimana mekanisme pendisiplinan dapat berjalan secara maksimal, *yaitu* normalisasi penilaian. Normalisasi penilaian adalah instrumen pendisiplinan yang menjadi instrumen penilaian untuk melakukan pengawasan terhadap individu (Walshaw, 2007 dalam Nanang Martono, 2014: 90). Proses normalisasi di lingkungan sekolah adalah dengan diberlakukannya sejumlah peraturan-peraturan yang dibuat

berdasarkan suatu kesepakatan bersama dan biasanya dilengkapi ganjaran atau lengkap dengan sanksi tertentu jika kedapatan melanggar tata tertib sekolah. Sama halnya dengan SMAN 2 Karanganyar, sekolah juga menerapkan peraturan-peraturan yang ada dalam tata tertib siswa. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan setelah melakukan rapat pleno setiap ajaran baru bersama orang tua/wali siswa, perwakilan sekolah dan perwakilan siswa. Setelah disepakati hasilnya akan dibagiakan pada siswa dalam bentuk pemberitahuan tata tertib siswa yang juga dilengkapi dengan sanksi poin jika kedapatan melakukan salah satu bentuk tindakan pelanggaran.

Tata tertib siswa di SMAN 2 Karangayar selalu dilengkapi dengan sanksi poin sebagai ganjaran jika melakukan bentuk tindakan pelanggaran tata tertib siswa. Namun penjatuhan sanksi poin tidak serta merta diterapkan pada siswa saat itu juga ketika siswa kedapatan melanggar tata tertib. Sebelumnya ada suatu

proses dimana siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan sebab dan latar belakang mengapa siswa tersebut melakukan pelanggaran tata tertib. Di SMAN 2 Karangayar guru pembimbing BK dan petugas STP2K melalui informan SK dan SS mengungkapkan bahwa guru memiliki dua tingkatan awal sebelum penjatuhan sanksi poin. Terlebih dahulu akan diberikan peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran tata tertib, selanjutnya ada perintah untuk mengerjakan sholat Dhuha sebagai bentuk penyesalan melakukan pelanggaran tata tertib untuk kedua kalinya, baru setelah itu sanksi poin dijatuhkan jika tetap melakukan pengulangan pelanggaran tata tertib siswa. Hal ini menunjukkan bahwa SMAN 2 Karangayar juga menerapkan hukuman yang mendisiplinkan yang artinya “hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan terhukum, jauh dari tujuan membalas dendam” (Foucault, 1975 dalam Nanang Martono, 2014: 85)

Dengan diberlakukannya tata tertib siswa di SMAN 2 Karangayar itu menunjukkan bahwa SMAN 2 Karangayar menerapkan syarat mekanisme pendisiplinan agar berjalan maksimal yang kedua yaitu normalisasi melalui pemberlakuan tata tertib siswa yang dilengkapi dengan penerapan sanksi poin dan perintah melaksanakan sholat Dhuha sebagai ganjaran jika melakukan pelanggaran tata tertib siswa.

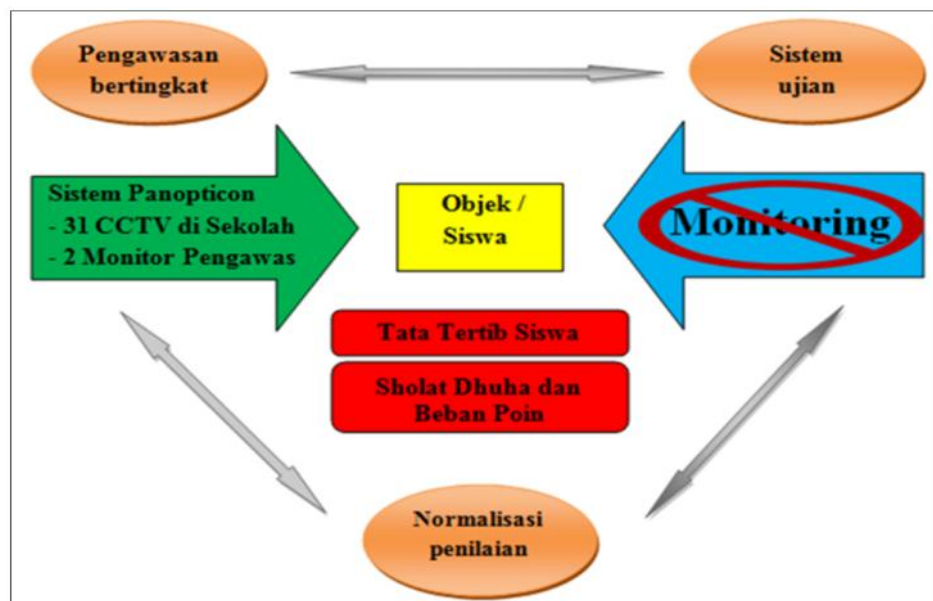
Ketiga, sistem ujian merupakan penggabungan model pengamatan hierarkis dan normalisasi penilaian atau menggabungkan unsur kekuasaan dan pengawasan (Foucault, 1975 dalam Nanang Martono, 2014: 92). Sistem ujian yang bisa berjalan melalui mekanisme pendisiplinan CCTV di sekolah adalah adanya proses monitoring oleh pengawas secara terus menerus. Proses monitoring tersebut dapat membuktikan apakah siswa selalu patuh pada tata tertib sekolah atau siswa kerap mengulangi bentuk

tindakan pelanggaran tata tertib sekolah.

Namun apa yang terjadi di SMAN 2 Karangayar adalah peristiwa yang berbeda. Penggunaan CCTV dilakukan hanya ketika ada laporan

pelanggaran tata tertib pencurian.

Jika ditelaah ulang proses tersebut bukan melakukan pengawasan, sebab kejadiannya adalah melihat kembali rekaman CCTV bukan melihatnya secara *real time* kejadian tersebut terjadi. Padahal



Mekanisme Pendiisiplinan Siswa SMAN 2 Karangayar Mengacu Pada Konsep Mekanisme Pendiisiplinan Focault

kehilangan dari siswa. Pihak sekolah melalui operator yang bertanggungjawab baru melihat CCTV dengan cara membuka rekaman CCTV untuk menindaklanjuti pelaporan kehilangan tersebut. Lalu jika memang dari rekaman CCTV dinyatakan bahwa itu adalah tindakan pencurian pihak sekolah baru menindaklanjutinya sebagai

keunggulan lain dari penggunaan CCTV sebagai sistem pengawasan adalah kemampuannya menunjukkan situasi dan kondisi suatu tempat secara *real time* tanpa pihak yang berada di tempat tersebut mengetahui kapan tepatnya ia diawasi. Ketidaktahuan inilah yang akhirnya menimbulkan kesadaran dan visibilitas individu dalam ruangan ber-CCTV secara

otomatis dan seolah olah permanen bahwa dirinya diawasi setiap saat.

Sama halnya yang terjadi di SMAN 2 Karangayar yang menerapkan mekanisme pendisiplinan menggunakan CCTV. Namun karena tidak adanya seseorang yang bertanggungjawab melakukan monitoring secara terus-menerus dan ternyata hal ini di ketahui siswa secara keseluruhan maka mengakibatkan gagalnya fungsi sistem ujian dalam keseluruhan mekanisme pendisiplinan. Selanjutnya, siswa yang mengetahui bahwa sistem ujian tidak pernah berjalan mulai mengabaikan sistem pengawasan panopticon oleh CCTV hal ini berdampak pada tidak bergunanya sistem normalisasi yang di dalamnya memuat standarisasi berperilaku dan bertindak di sekolah. Akhirnya, siswa tidak peduli apakah dirinya termasuk golongan taat atau tidak taat karena menurutnya tidak ada pihak yang berkuasa yang memberikan pelabelan tersebut pada dirinya.

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan mengenai penggunaan CCTV di SMAN 2 Karangayar sebagai mekanisme pendisiplinan berikut ini:

1. Bentuk pelanggaran tata tertib siswa yang dilakukan siswa di SMAN 2 Karangayar yang sudah terekam CCTV di kategorikan ke dalam tiga jenis pelanggaran tata tertib. Yang, *pertama*, ada bentuk tindakan pelanggaran tata tertib hubungan yaitu tindak pencurian oleh siswa dengan beban poin 50. *Kedua*, bentuk tindakan pelanggaran tata tertib lingkungan, yaitu gaduh di kelas, merusak mebeler, melompat pagar, dan membawa HP ke sekolah dengan beban poin 10-20. *Ketiga*, tidak tertib sholat berjamaah yang merupakan bentuk tindakan pelanggaran tata tertib ibadah dengan beban poin 10-25.
2. Upaya yang dilakukan SMAN 2 Karangayar dalam menggunakan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan siswa dengan penggunaan 22 CCTV di ruang kelas dan 9 CCTV di ruang publik

dalam lingkungan sekolah. Selain itu juga adanya hierarki pengawasan yang dilakukan sekolah dengan menempatkan monitor pengawas CCTV di ruang kepala sekolah dan ruang Bimbingan dan Konseling. Penggunaan CCTV sebagai mekanisme pendisiplinan di SMAN 2 Karangayar tidak efektif karena salah satu syarat pendisiplinan yaitu sistem ujian tidak berlangsung dan hal ini diketahui secara umum oleh siswa. Sehingga menyebabkan efek panopticon yang seharusnya menimbulkan kesadaran dan visibilitas yang membuat individu merasa otomatis diawasi dan seolah olah permanen tidak terjadi.

Daftar Pustaka

- Ashari, A. 2013. *Pengelolaan Tata Tertib Siswa Berbasis Poin Pelanggaran (Studi Situs SMK Negeri 3 Pacitan)*. Thesis. Universitas Muhamadiyah Surakarta. Diperoleh pada 10 Maret 2016 pukul 09:59 WIB dari eprints.ums.ac.id/26354/12/Naskah_publicasi.pdf
- Badan Pusat Statistika. 2016. *Perkiraan Penduduk Beberapa Negara Tahun 2000–2014*. Diperoleh pada 17 Maret 2016 pukul 20:10 WIB dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>
- Foucault, M. 1977. *Discipline And Punish: The Birth Of The Prison*. Terj. Sheridan, Alan. England: Penguin Book.
- Hardiyatna, P., S. (Ed). 1997. *Michel Foucault Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKis
- Hurlock, E. 2011. *Perkembangan Anak: Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Indrakusuma, A. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Khotib. 2012. *Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakan Media Closed Circuit Television (CCTV) di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya*. Skripsi. Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Diperoleh pada 7 Januari 2016 pukul 21:05 WIB dari <http://digilib.uinsby.ac.id/10128/>
- Nanang Martono. 2014. *Sosiologi Pendidikan: Michel Foucault*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utami Munandar. 2002. *Kreativitas dan Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Unaradjan, D. 2003. *Manajemen Disiplin*. Jakarta: PT. Grasindo.